



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Februari 2016

Halaman: 21

Tarif Layanan Puskesmas di Yogya Naik

YOGYAKARTA — Mulai Maret mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan memberlakukan tarif baru untuk pelayanan di seluruh puskesmas. Tarif baru untuk pelayanan medis, nonmedis, dan pelayanan lain ini diberlakukan seiring perubahan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sekaligus untuk pengoptimalan mutu puskesmas.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Agus Sudrajat menjelaskan, pemberlakuan tarif baru pelayanan puskesmas ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 59/2015, yang merupakan pengganti Perwal Nomor 69/2013 tentang tarif pelayanan BLUD. "Beberapa tarif puskesmas tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini," ujar dia di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (25/2).

Saat ini ada 18 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan wilayah Kota

Yogyakarta. Menurut Agus, biaya operasional puskesmas selama ini didukung dana dari APBD Kota Yogyakarta. Namun, kata dia, sejumlah puskesmas juga diakses penduduk luar daerah. "Karena itulah tarif layanan kesehatan di puskesmas ini kita naikan," kata dia.

Kenaikan tarif pelayanan kesehatan tidak berdampak pada masyarakat Kota Yogyakarta. Pasalnya, Agus menjelaskan, masyarakat Kota Yogyakarta pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS), biaya kesehatannya di puskesmas sudah dijamin melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari APBD. Sedangkan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga gratis mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas yang menjadi pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Penduduk Kota Yogyakarta non-KMS dan belum terdaftar BPJS juga bisa mengakses layanan kesehatan di

puskesmas secara gratis hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK).

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar Dinkes Kota Yogyakarta Lana Unwanah menambahkan, di beberapa puskesmas, 50 persen pengunjung yang mengakses pelayanan kesehatan bukan warga Kota Yogyakarta. Contohnya, di Puskesmas Mantrijeron, Kotagede, dan Puskesmas Umbulharjo I di mana setengah pengunjungnya merupakan warga asal Bantul. Sedangkan di Puskesmas Tegalarjo dan Jetis pengunjungnya 50 persen berasal dari Kabupaten Sleman.

Menurut Lana, tarif puskesmas pun sudah harus menyesuaikan dengan kenaikan harga alat-alat kesehatan yang cukup signifikan. Untuk pelayanan medis, tarif yang naik salah satunya untuk pengobatan atau pemeriksaan dari semula Rp 5.000 menjadi Rp 22 ribu. Sedangkan untuk pelayanan nonmedis

dan lainnya, tarif yang naik, antara lain terkait pelayanan data dan informasi praktik kerja lapangan (PKL), pendampingan PKL, pelayanan penelitian, dan pelayanan studi banding.

Contohnya, pelayanan penelitian dari semula tidak dipungut biaya menjadi dipatok Rp 300 ribu. "Untuk PKL, dulu tidak diatur. Tetapi, ternyata banyak teman di puskesmas yang melakukan pendampingan itu mengganggu pelayanan, sehingga diatur sesuai dengan jumlah siswa yang dibimbing dan data yang diambil dari puskesmas," ujar Lana.

Pendapatan melalui kenaikan tarif layanan ini nanti akan sepenuhnya kembali ke puskesmas dalam bentuk perbaikan peningkatan layanan, bukan masuk ke kas daerah. Dengan begitu, menurut Agus, dapat membantu optimalisasi peningkatan mutu layanan puskesmas. Saat ini sudah ada satu puskesmas berprestasi tingkat na-

Masyarakat Kota Yogyakarta pemegang KMS biaya kesehatannya di puskesmas sudah dijamin Jamkesda.

sional dan terakreditasi paripurna, yaitu Puskesmas Mantrijeron. Tahun ini akan ada sembilan puskesmas lagi yang meraih akreditasi serupa. "Ini bentuk peningkatan layanan yang kami lakukan. Jadi, terarah dan terpanut dengan baik," kata Agus.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005